BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2023, serta tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2023 dilihat dari PAD, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pajak daerah menjadi sumber dominan dalam PAD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2023 menunjukkan tren positif dan signifikan. Realisasi selalu melampaui target berturut-turut, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan potensi yang baik dari sektor pajak.
- b. Retribusi daerah menunjukkan kontribusi yang masih rendah dan cenderung fluktuatif terhadap PAD. Selama tahun 2021-2023, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
- c. Tingkat kemandirian keuangan selama tahun 2021-2023 masih tergolong rendah, dengan klasifikasi pola hubungan keuangan “instruktif”, yang artinya masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- d. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) di Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan pada tahun 2021-2023, karena berlaku efektif sejak 5 Januari 2024. Hal ini karena Peraturan Daerah diberikan waktu hingga dua tahun untuk menyusun Peraturan Daerah baru sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan , maka disamapaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menajadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam meingkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD, sebagai berikut:

- a. Rendahnya kontribusi pajak daerah di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh terbatasnya basis pajak, lemahnya sistem pemungutan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meingkatkan edukasi dan sosialisasi, khusunya di wilayah terpencil, serta memperkuat layanan melalui petugas keliling, digitalisasi sistem pembayaranm dan pemetaan wajib pajak agar penerimaan pajak lebih optimal.
- b. Pemerintah daerah juga diharapkan menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui penambahan objek pajak serta pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan investasi yang produktif, seperti kerjasama pemanfaatan lahan, bangunan, atau fasilitas umum yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komponen “Lain-lain PAD yang Sah” yang bersifat fluktuatif dan kurang diandalkan sebagai sumber pendapatan jangka panjang.
- c. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi pemungutan retribusi agar dilakukan oleh instansi resmi bukan oknum dengan pengawasan ketat, serta meningkatkan layanan publik seperti parkir, pasar, dan perizinan. Pengutan regulasi dan pengawasan yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD.

- d. Sejalan dengan berlakunya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu memanfaatkan ketentuan dalam UU HKPD dengan memperluas basis pajak, menyusun regulasi retribusi yang lebih adaptif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi sistem pemungutan guna mendorong peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD secara berkelanjutan.